

*M*emenuhi amanat pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian ditegaskan a ditegaskan dalam pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Padang, Januari 2019
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI. AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Urusan Wajib Penanaman Modal

1. PROGRAM DAN KEGIATAN



in as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program kerja dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan penanaman modal di daerah. Didalam mewujudkan program kerja dan perjanjian kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 17.214.917.090,32,- dan telah direalisasikan sampai dengan keadaan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 16.817.410.533,- atau sebesar 97,69% . Untuk Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS, dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah mendapat dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 5.624.333.236,32,- dengan realisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.379.201.163,- atau sebesar 95,64%. Sementara itu program kerja yang disusun dalam bentuk kegiatan, dimana rencana program kerja yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur, dialokasikan melalui Belanja Langsung (yang terdiri dari Belanja Langsung Pokok dan Belanja Langsung Urusan) dengan jumlah dana sebesar Rp. 11.590.583.854,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 11.438.209.370,- atau sebesar 98,68%. Program DPM & PTSP tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 1.135.494.329,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.123.043.050,- atau sebesar 97,97%.
- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 1.451.205.200,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.413.909.346,- atau sebesar 98,05%.
- c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 44.400.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 44.400.000,- atau sebesar 100%.

- d. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 271.361.050,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 268.344.904,- atau sebesar 98,89%.
- e. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 398.736.850,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 389.305.839,- atau sebesar 98,82%.
- f. **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 3.797.846.700,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.750.963.067,- atau sebesar 97,43%.
- g. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu** mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 4.491.539.725,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.448.243.164,- atau sebesar 97,30%.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

I. BELANJA LANGSUNG POKOK

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah;
8. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
11. Penyediaan Jasa Tenaga Sopir;
12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mebeuler;
2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
3. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler;
8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD;
9. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional;
10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
2. Penatausahaan Keuangan SKPD;
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;
5. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan.

II. BELANJA LANGSUNG URUSAN

A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Penyelesaian Permasalahan Investasi;
2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal;
3. Promosi Investasi;
4. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal;
5. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat;
6. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;

7. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat;
8. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
9. Gelar Potensi dan Temu Usaha;
10. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal;
11. Forum Komunikasi Usaha Daerah;
12. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi;
13. Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha;
14. Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi;
15. Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja;
16. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
17. Forum Investasi Sumatera Barat.

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Forum PTSP;
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan;
4. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu;
5. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan;
6. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi;
7. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan;
8. Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
9. Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan;
10. Penilaian Standar Mutu Perizinan.

2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN



ari program dan kegiatan yang telah disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018 semua kegiatan dapat diselesaikan 100% dan dapat mencapai target kinerja output yang telah ditetapkan. Bahkan ada beberapa kegiatan yang kinerja outputnya melebihi target >100%,

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Belanja Langsung Urusan sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Adapun Kegiatan-kegiatan untuk mendukung terwujudnya pencapaian target program ini, sebagai berikut :

a. **Penyelesaian Permasalahan Investasi**, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi ini adalah sebesar Rp. 121.408.100,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi sebesar Rp. 120.062.636,- atau 98,89%, serta capaian fisiknya sebesar 128.57%. Kinerja keluaran kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi melebihi target yang direncanakan.

- Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi adalah sebagai implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Instansi Teknis terkait dalam Penanaman modal atau yang menangani fungsi Penanaman Modal di Kab/Kota merupakan lembaga yang mengkoordinir kegiatan investasi PMA/PMDN yang menjadi kewenangan masing-masing diharapkan dapat membantu para penanam modal dapat merealisasikan

proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.

- Tujuan kegiatan ini adalah agar permasalahan investasi yang mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMA/PMDN di Kabupaten/Kota khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu Tim koordinasi penanaman modal yang melibatkan instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- Keluaran atau output dari kegiatan ini:
 1. Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang difasilitasi permasalahan dalam Penanaman Modal sebanyak 9 Perusahaan PMA/PMDN.
 2. Dari 9 perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya semuanya dapat diselesaikan.
- Hambatan didalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada yang berarti, namun dukungan anggaran untuk penyelesaian permasalahan investasi sangat dibutuhkan.

b. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal, dukungan anggaran untuk kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 47.978.000,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 46.867.300,- atau 97,68%, dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dari kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal yaitu Mensosialisasikan Kebijakan Penanaman Modal terkait kebijakan dan regulasi yang terjadi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Dan tujuannya adalah agar Regulasi dan Kebijakan terkait Penanaman Modal diketahui dan dipahami oleh instansi teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota, akademisi, dunia usaha dan tokoh masyarakat.
- Keluaran atau output dari kegiatan ini:

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi terkait Penanaman Modal kepada 80 (delapan puluh) orang aparatur instansi teknis baik tingkat provinsi, kabupaten / kota, akademisi, dunia usaha dan tokoh masyarakat

- Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada, hanya perlu koordinasi dan kerja sama aktif antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam hal penyediaan data dan informasi terbaru terkait kebijakan dibidang penanaman modal.

c. Promosi Investasi, dukungan anggaran untuk kegiatan Promosi Investasi ini adalah sebesar Rp. 1.793.093.500,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 1.790.973.705,- atau 99,87%, dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai dilaksanakan sesuai target yang direncanakan yakni 17 ivent promosi yang diikuti baik dalam negeri maupun luar negeri.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan Promosi Investasi ini adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha/investor sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Disamping itu juga untuk menarik minat calon investor yang ingin berinvestasi serta membangun citra yang dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan yang menguntungkan.
- Keluaran dan outputnya dari kegiatan Promosi Investasi terlaksananya keikutsertaan Sumatera Barat dalam 17 ivent promosi baik dalam dan luar negeri berupa forum dan business meeting. Adapun ivent dalam negeri yang diikuti adalah sebagai berikut:

Dalam Negeri :

1. Regional Investment Forum (RIF 2018) Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 13 s/d 16 Maret 2018 di The Alana Yogyakarta Hoptel & Convetion Center, Jalan Palagan Tentara Pelajar KM. 7 Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta, 55581.
2. Undangan Misi Dagang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18 s/d 19 Mei di Ruang Auditorium 1 & 2, gedung Utama Kementrian Perdagangan, Jalan M.I Riodwan Rais No. 5, jakarta Pusat 10110.
3. Apkasi Otonomi Daerah Expo : Trade, Tourism, and Investment 2018 tanggal 5 s.d 8 Juli 2018 di Hall 3 dan 3A, Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Sepong Damai City, Tangerang.

4. Teknikal Meeting Trade Expo Indonesia 2018 tanggal 18 s.d 20 September 2018 di Nusantara Convation Hall 1, ICE-BSD City, Tangerang.
5. Pameran Indonesia Infrastucture week (IIW) Tahun 2018 tanggal 30 Oktober s.d 2 November 2018 di Jakarta International Expo (Jie Expo).
6. Pelaksanaan Kegiatan Sumatera Barat Expo (Sumbar Expo) 2018 tanggal 14 s.d 17 November 2018 di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Luar Negeri :

1. Berdasarkan surat undangan KJRI di Chicago, Amerika Serikat, Nomor 068/EKO/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Undangan Breakfast Meeting dengan American Society of Travel Agents (ASTA), Chicago, 28 Maret 2018 dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 29 Maret 2018.
2. Berdasarkan surat undangan Be-Indonesia Nomor 085/SK-KCK/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal Permohonan Dukungan dan Partisipasi di Indonesia Weeks 2018 Nagoya ke-2 di Nagoya pada tanggal 26 April s/d 1 Mei 2018 di Jepang.
3. Berdasarkan surat undangan Duta Besar RI untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania Nomor 27/DB/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Undangan Partisipasi pada Fez Economic Forum (FEF) tanggal 27-29 Juni 2017 dilaksanakan 26 Juni s/d 1 Juli 2018.
4. Undangan surat Duta Besar Republik Indonesia di Moscow nomor 106/KM/DBS/II/2017 tanggal 3 Februari 2018 perihal Undangan Partisipasi pada Festival Indonesia (FI) di Hermitage Garden, Mocrow, 4-6 Agustus 2018 dan nomor 816/KM/DBS/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Undangan Partisipasi Festival Indonesia (FI) ke-3 di Mocrow, Rusia 3-5 Agustus 2018 dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018
5. Surat undangan dari Kedutaan Besar RI Bandar Seri Begawan Nomor 001/DB/IV/2018 tanggal 26 April 2018 perihal undangan acara Resepsi Diplomatik dan Pameran Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di Brunei

dan nomor 28/DB/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal yang sama yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus s/d September 2018.

6. Berdasarkan surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing nomor 1292/UM/K/08/18/09 tanggal 14 Agustus 2018 dan surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/PEN/SD/2/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Undangan Partisipasi City of Charm pada 15th China ASEAN Expo (CAEXPO) 2018 tanggal 12 s/d 15 September 2018, Nanning-Guangxi, RRT, Kementerian Perdagangan beserta KBRI Beijing dan KJRI Guangzhou akan kembali berpartisipasi pada 15th China ASEAN Expo (CAEXPO) 2018 tanggal 12 s/d 15 September 2018 di Nanning, Provinsi Guangxi yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 15 September 2018.
7. Surat Undangan Duta Besar Republik Indonesia untuk Canberra nomor 0637/SRK/07/2018/03 tanggal 16 Juli 2018 perihal Indonesia-Australia Business Summit (IABS) 2018 di Melbourne, 26-27 September 2018 pada tanggal 24 s/d 27 September 2018.
8. Merujuk surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor S-88/D.VII.M.EKON.09/2018 tanggal 5 September 2018 perihal Permohonan menjadi anggota Delegasi RI pada pertemuan Chief Ministers and Governors' Forum (CMGF) ke-15 dan rangkaian Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri IMT-GT ke-24 tanggal 28 September s/d 3 Oktober 2018 di Melaka, Malaysia.
9. Merujuk dari berita biasa dari Duta Besar RI di Roma Nomor B-00350/ROMA/180918 tanggal 18 September 2018 perihal Usulan acara kunjungan Gubernur Provinsi Sumbar ke Italia dan Malta Bulan Oktober 2018 dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 24 Oktober 2018.
10. Surat undangan KBRI Brasilia-DF di Brazil, Nomor 237/EK/10/18 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Rencana Investasi ke Brasil dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 14 November 2018.

Berdasarkan surat undangan KBRI Brasilia-DF di Brazil, Nomor 237/EK/10/18 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Rencana Investasi ke Brasil yang dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 9 Desember 2018.

- Hambatan dalam pelaksanaan promosi investasi adalah data pendukung terhadap materi promosi yang belum lengkap seperti data peluang investasi yang belum clean and clear.

d. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal, dukungan anggaran untuk kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 150.677.850,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini mencapai Rp. 148.150.840,- atau (98,32%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan updating sistem informasi spasial penanaman modal ini adalah merupakan salah satu kegiatan dalam membantu mendorong pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi spasial penanaman modal yang lebih diarahkan pada pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam, penataan data dan informasi yang meliputi potensi dan peluang investasi, pembangunan dan pengembangan basis data spasial serta terwujudnya jaringan sistem informasi pada tingkat regional/provinsi yang terdiri dari peta kesesuaian lahan, status hutan dan peta investasi existing.
- Keluarannya adalah membuat peta dan database serta sistem informasi spasial sebanyak 1 sektor yakni di sektor pariwisata.
- Hasil (outcome) kegiatan ini adalah terupdatenya sistem informasi Spasial Penanaman Modal sebanyak 1 sektor.

e. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat ini adalah sebesar Rp. 187.700.000,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 185.242.260,- atau (98,69%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan Penyusunan potensi dan peluang investasi Sumatera Barat ini adalah membuat direktori potensi daerah

kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat untuk memberikan informasi kepada calon investor terhadap sektor bidang usaha mereka berinvestasi.

- Keluaran dan outputnya dari kegiatan ini adalah :
 - Jumlah buku profil peluang investasi Sumatera Barat sebantak 300 buku
 - Jumlah Leaflet peluang investasi Sumatera Barat sebanyak 2.000 exemplar.
 - Jumlah buku direktori potensi investasi Sumatera Barat sebanyak 100 buku
 - Updating data potensi dan peluang investasi Sumatera Barat di 19 kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

f. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 123.929.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 121.883.699,- atau (98,35%). Untuk realisasi fisik dari kegiatan ini tercapai sebesar 100%.

- Maksud dan tujuan dari Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah melakukan dan mengikuti pertemuan Koordinasi Kelembagaan Investasi Daerah dalam lingkup Provinsi dan Nasional untuk bertukar Informasi serta mencari Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah.
- Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal serta pelayanan perizinan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya harmonisasi perencanaan dan

kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (sesuai target) sebanyak 4 rumusan terkait perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal.

- Koordinasi dan kerja sama aktif dalam penyediaan data dan informasi terkait penanaman modal dan sumbangsih pemikiran lainnya antar bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan.

g. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera

Barat, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat ini adalah sebesar Rp. 103.334.800,-. Dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 96.349.775,- atau (93,24%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dari kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat adalah pengumpulan dan analisis terhadap data-data penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat yang terealisasi di tahun 2018 dimana tujuannya adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang penanaman modal yang *up to date* dan informatif bagi pengguna Buku Data Perkembangan Modal Sumatera Barat sebagai dasar untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun kebijakan daerah mengenai penanaman modal serta terlaksananya Konsolidasi Data Realisasi Penanaman Modal Provinsi karena realisasi penanaman modal merupakan salah satu kinerja yang dibebankan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat sebanyak 100 buah buku serta konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan kabupaten/kota terlaksana dengan baik 100%.
- Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah sebagai bahan dan pedoman bagi pengambil kebijakan.

h. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dukungan anggaran untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah

sebesar Rp. 90.676.700,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 86.713.480,- atau sebesar 95,63% dan realisasi fisik dapat tercapai 111,76% melebihi target dari 17 perusahaan yang ditargetkan terealisasi 19 perusahaan.

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal serta Pemeriksaan yang dibarengi dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA/PMDN terkait dengan penerbitan izin usaha yang telah dikeluarkan terhadap perusahaan yang sudah memproduksi komersil dan telah merealisasi investasinya minimal 75% dari rencana investasi serta proses pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan izin usaha bagi perusahaan yang tidak pernah merealisasi investasinya sama sekali dan tidak lagi memproduksi atau macet serta tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

- Dengan demikian maksud dan tujuan dilaksanakan Pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN adalah agar penyimpangan yang dilakukan para penanam modal dapat diminimalisir sesuai ketentuan yang berlaku dan DPM & PTSP Provinsi tidak lagi mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada akan lebih baik serta diharapkan target realisasi investasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah:
 1. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 19 perusahaan (tercapai sesuai target), yaitu:
 - 15 perusahaan sudah produksi
 - 4 perusahaan masih dalam masa konstruksi
 - 1 perusahaan berganti nama dari PT. Surga Ombak menjadi PT. Hidden Bay Resort Mentawai.
- Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah:

Dengan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dapat diketahui keadaan sebenarnya dilapangan terkait investasi yang dilakukan oleh investor, seperti:

1. Apakah perusahaan masih dalam keadaan kontruksi atau tahap pembangunan;
2. Apakah perusahaan sudah produksi komersil;
3. Apakah perusahaan dalam keadaan macet ataupun yang sedang bermasalah
4. Apakah perusahaan sedang menghadapi masalah atau melakukan penyimpangan dari peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- i. **Gelar Potensi dan Temu Usaha**, dukungan anggaran untuk kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha ini adalah sebesar Rp. 234.044.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 233.049.585,- atau (99,58%), sedangkan realisasi fisiknya tercapai 100%, sesuai dengan target.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:
- Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka mempromosikan sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor.
 - Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

Penyelenggaraan dari kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha adalah merupakan kegiatan pertemuan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi peluang investasi dengan para pengusaha perantau Minang, Asosiasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi, calon investor baik nasional maupun internasional.

Kegiatan ini telah melakukan fasilitasi kepada calon investor yang pelaksanaan bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Makasar.

- Keluaran dari kegiatan ini dapat dilaksanakan dan dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 100

orang dimana pelaksanaannya bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Makasar yang menghadirkan 4 narasumber dari kabupaten/kota, yakni Kepala DPM & PTSP Kota Padang Panjang, Bupati Kab Sijunjung, Bupati Kab. Pasaman dan Walikota Sawahlunto. Disamping itu juga pelaksanaan one on one meeting di Jakarta.

➤ Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketertarikan beberapa investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat, yakni:

5. PT. Kalla Electrical System, Bpk. Bambang Indra yang tertarik berinvestasi di sektor Kelistrikan di Kabupaten Pasaman.
6. Sub Holding Development and Contruction (Jadli Kalla Group) yang tertarik berinvestasi di sektor Pertambangan dan Properti.
7. Friska, yang tertarik berinvestasi di sektor Industri, Sektor Perdagangan dan sektor Tambang dan Gas.
8. Lukman, yang tertarik berinvestasi di sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
9. Albert, yang tertarik untuk berinvestasi di sektor Integrated Coconut.

j. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal, dukungan anggaran untuk kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 470.408.200,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 469.132.100,- atau (99,73%) serta realisasi fisik tercapai 100%.

➤ Maksud dan tujuan dari kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal ini adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan Sumatera Barat kepada seluruh pihak baik dalam dan luar negeri serta memberikan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ada di Sumatera Barat agar diketahui oleh Investor sehingga nantinya menjadikan Sumatera Barat menjadi tujuan investasinya.

➤ Keluaran dari kegiatan ini adalah

1. Terlaksananya pertemuan Investor di Auditorium Gubernur dengan tema acara "*Showcasing Investment Opportunities in West Sumatra's Tourism Industry*"
2. Pemeran Minangkabau Summit 2018 yang merupakan ajang mempromosikan produk, kegiatan, potensi dan peluang investasi di Sumatera Barat
3. Penyebarluasan informasi melalui media massa pada 4 media koran nasional, majalah nasional, TV Nasional dan TV Lokal.

k. Forum Komunikasi Usaha Daerah, dukungan anggaran untuk kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini adalah sebesar Rp. 70.317.300,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 68.960.704,- atau (98,07%). Dan realisasi fisiknya sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%.

- Maksud dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan untuk meningkat dan mengembangkan usaha dalam sebuah Forum Komunikasi Usaha Daerah diantara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan para pelaku usaha. Forum ini bertujuan untuk mencari solusi dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha untuk menghadapi tantangan kendala dan hambatan dalam meningkatkan dan megembangkan dunia usaha di Sumatera Barat.
- Keluaran (output) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini adalah terlaksananya forum komunikasi usaha daerah dengan jumlah peserta 100 orang.
- Hasil (outcome) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah adalah adanya usulan dasar rekomendasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi daerah tentang kemitraan Usaha di kalangan pelaku usaha di daerah.

l. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi dukungan anggaran untuk kegiatan Koordinasi dan Misi Investasi ini adalah sebesar Rp. 59.134.700,- dan dapat direalisasikan keuangan sebesar Rp. 58.230.295,- atau (98,47%), serta realisasi fisik tercapai 100%.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengkoordinasikan berbagai sektor baik hulu maupun hilir terkait dalam hal promosi dan misi investasi yang akan dilakukan baik dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Calon Investor.
 - Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha yang berminat ke daerah tempat tujuan rencana investasi.
 - Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan.
- Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
- Terlaksananya koordinasi promosi dan misi investasi dengan kabupaten/kota sebanyak 6 kabupaten/kota sesuai target (target 6 kabupaten/kota). Jumlah calon investor yang difasilitasi sebanyak 6 calon Investor sesuai target (target 6 calon investor) yang menunjukkan keseriusannya, yaitu:
 1. China Huadian Enginer CO, LTD, untuk rencana proyek investasi PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), di Pasaman, Agam dan Solok (Danau diatas dan Danau dibawah),
 2. PT Surabaya Indah Permai Indonesia, untuk rencana investasi Industri Hilir Tanaman Nilam untuk memproduksi produk Safe Care (bahan campuran aroma terapi) di Kabupaten Pasaman Barat.
 3. Coze International PIL untuk rencana investasi Gheothermal dan panas bumi untuk di Kabupaten Solok Selatan.
 4. Kyuden Mirai Energy, Co.INC, Perusahaan Listrik dari Jepang yang berminat kerjasama Cangkang Sawit untuk dijadikan Sumber Energi ramah lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
 5. PT. Awina Sinergi International Perusahaan Listrik dari Jepang yang berminat kerjasama Cangkang Sawit untuk dijadikan Sumber Energi ramah lingkungan Pasaman Barat.
 6. PT Akuo Energi Indonesia bergerak dalam bidang pengembangan pembangkit listrik skala besar berbasis energi terbarukan yang berminat berinvestasi pada PLTA.

m. Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha ini adalah sebesar Rp. 55.576.650,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 55.549.950,- atau (99,95%), dan realisasi fisik tercapai 100%.

- Adapun maksud dari kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha ini dimaksudkan untuk Menyediakan data dan informasi pelaku usaha yang berpotensi untuk bermitra mengenai gambaran informasi tentang prospek pelaku usaha di kabupaten dan Kota untuk bermitra di Sumatera Barat. Sedangkan Tujuan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi pelaku usaha secara akurat dan mengetahui kelayakan pelaku usaha untuk bermitra sehingga memudahkan terlaksananya kemitraan.
- Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah buku direktori mitra usaha yang potensial di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Tahun 2018 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buku, dapat dicapai sesuai target.
- Dan Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah dapat tersusunnya buku direktori mitra usaha yang potensial yang tersebar di kabupaten/kota se Sumatera Barat yang dapat difasilitasi untuk bermitra dengan pengusaha besar yang ada di Sumatera Barat

n. Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi ini adalah sebesar Rp. 36.883.800,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 36.571.389,- atau (99,15%), dan realisasi fisik tercapai 100%.

- Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi ini adalah pertemuan DPM & PTSP Provinsi dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang menghadirkan Narasumber dari BKPM RI terkait bagaimana koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara BKPM RI dengan DPM & PTSP Provinsi dan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait investasi di Sumatera Barat serta strategi promosi yang tepat sesuai dengan kondisi setiap daerah di Sumatera Barat.

- Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan pengumpulan data ke Kabupaten/Kota, yakni :
 - Kota Padang Panjang
 - Kota Bukittinggi
 - Kabupaten 50 Kota
 - Kota Payakumbuh
 - Kabupaten Pasaman Barat
 - Kabupaten Tanah Datar
 - Kota Sawahlunto
- **Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja** dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Workshop Pola pikir dan Budaya Kerja ini adalah sebesar Rp. 39.629.500,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 38.497.599,- atau (97,14%), dan realisasi fisik tercapai 100%.
- Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini Workshop pola pikir dan budaya kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah untuk meningkatkan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada investor, masyarakat dan instansi terkait secara prima dan excellent. Sementara Tujuan dari Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - Meningkatkan kemampuan pola pikir dan merubah budaya kerja seluruh aparatur DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima jasa layanan.
 - Meningkatkan Disiplin dan Etika Aparatur dalam menjalankan komitmen organisasi dalam rangka mencapai Visi dan Misi DPM&PTSP.
 - Meningkatkan kualitas Pelayanan Aparatur DPM & PTSP kepada masyarakat serta membangun citra positif pemerintah.
 - Perubahan dalam cara berfikir dan cara bekerja melalui pembangunan karakter aparatur dengan membentuk sikap mental yang positif.
- Hasil (outcome) kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat tentang pola pikir positif dan budaya kerja

o. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 79.862.700,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 74.614.050,- atau (93,43%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

- Maksud dari kegiatan Bimbingan teknis Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal adalah untuk :
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan peserta mengenai Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
 - b. Untuk menambah pengetahuan tentang pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk pencapaian realisasi investasi di Sumatera.
 - c. Untuk menambah pengetahuan peserta tentang Sistem online Single Submission (OSS)
- Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :
 - a. Untuk menciptakan pemahaman bahwa betapa pentingnya pemahaman tentang Pengendalian pelaksanaan penanaman modal setelah diberlakukannya sistim On Line Single Submission (OSS).
 - b. Agar apratur DPM&PTSP Provinsi, Kab/Kota dan Perusahaan mengetahui tata cara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
 - d. Meningkatkan Koordinasi antara BKPM, DPM&PTSP Prov. Sumbar, DPM&PTSP Kab/Kota Se Sumatera Barat.
- Hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, adalah :
 - 1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan Personil OPD DPM&PTSP Provinsi dan Kab/Kota serta perusahaan PMA/PMDN tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal

setelah diberlakukannya online Single submission (OSS) oleh pemerintahan pusat.

2. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan peserta tentang tata cara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online.
3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan perusahaan tentang perizinan penerbitan izin melalui online Single submission (OSS).

p. Forum Investasi Sumatera Barat mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 133.191.900,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 120.113.700,- atau (90,18%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber, Belanja Bantuan Transportasi peserta dan Perjalanan dinas luar daerah di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin.

- Maksud dari kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat yaitu sebagai wujud tanggung DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan permasalahan investasi sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan juga akhirnya akan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat dan dapat membantu para investor agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.
- Tujuan kegiatan adalah untuk mengakomodir segala permasalahan yang dihadapi dihadapi oleh Perusahaan, DPM&PSTP Provinsi, Kab/Kota dalam menghadapi permasalahan investasi dan sebagainya untuk dicarikan solusi pemecahannya.
- Hasil Penyelenggaraan Forum Investasi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan tema "Peningkatan Investasi melalui Pengemabangan Sektor Pariwisata di Sumatera Barat" diperoleh rumusan sebagai berikut :
 - Perlunya percepatan pelayanan perizinan dimana adanya perubahan sistim untuk mempercepat pelayanan perizinan bagi investor.

- Perlunya persamaan persepsi yaitu Investasi itu penting bagi kemajuan daerah kita, investasi itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, investasi itu dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- Perlunya data yang lengkap dan akurat untuk dapat dijual ke pada investor dimana pada bidang infrastruktur seperti DED, FS dan sebagainya.
- Sektor pariwisata dapat mengerakkan sector ekonomi real dimana masyarakat dapat dilibatkan secara langsung dan mendapatkan dampak langsung dari uang yang dibawa oleh wisatawan.
- Adanya permasalahan invesasi seperti permasalahan perizinan, permasalahan lahan dan permasalahan yang berhubungan dengan deregulasi/kebijakan dapat diselesaikan dengan adanya Online Single Submission (OSS)
- Adanya arahan presiden RI agar pemerintah daerah untuk mengaktifkan Satuan Tugas Percepatan Berusaha. Agar pemerintah daerah tetap melakukan pelayanan perizinan yang belum diatur dalam OSS dan Penyederhanaan proses penyelesaian komitmen perizinan berusaha.
- 10 Prioritas pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021 pada point 6 berbunyi pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan investasi.
- Pengusulan KEK di bidang pariwisata masih terkendala dengan pembebasan tanah.
- Sektor pariwisata termasuk sektor teratas yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata termasuk investasi dimana sektor tersebut mendukung kegiatan pariwisata.
- Point utama pariwisata di Sumatera Barat yang perlu dipertimbangkan, 1) menambah masa kunjungan, 2) peningkatan ekonomi masyarakat dari kegiatan pariwisata, 3) wisatawan datang dan nyaman berwisata di Sumatera Barat.

- Investasi di sector kepariwisataan di Sumatera Barat hendaknya dapat melihat karakteristik dari wisatawan yang datang ke Sumatera Barat. Karakteristik wisatawan ke Sumatera Barat adalah 1) 73,4 % berusia 20-40 tahun, keluarga (49,8 %), lama kunjungan 2-3 hari, kunjungan berulang, pengeluaran Rp. 3-6 juta.
- Kota utama pariwisata di Sumatera Barat 1) Bukittinggi, 2) Padang, 3) Payakumbuh, 4) Tanah Datar, dan 5) Pesisir Selatan.
- Permasalahan investasi pariwisata di Sumbar, 1) Keunggulan investasi yang harus ada atraksi (attraction), aksesibel (accessibility), kemudahan (amenity), dan ancillary. 2) kompleksitas dan ketidakpastian investasi/ buruknya iklim investasi 3) higienis dan sanitasi, 4) bencana alam, dan 5 Penerbangan langsung dari target pasar ke destinasi.
- Strategi pengembangan investasi yang harus diperhatikan meliputi, 1) deregulasi berupa revisi terhadap regulasi, , 2) profiling, 3) promosi 4) advokasi, 5) pembiayaan,
- Alasan harus berinvestasi di sector pariwisata 1) sumber daya yang dimiliki baik sdm maupun sda yang besar, 2) Insentif berupa keterbukaan, kawasan ekonomi khusus dan kemudahan perizinan 3) investasi pariwisata mendapat dukungan dari berbagai sector termasuk dukungan infrastruktur
- Keberhasilan pariwisata tergantung dari Akademisi, pengusaha industry, komunitas, komitmen pemerintah, peran media.

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan program ini adalah sebagai berikut :

- Forum PTSP** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 66.594.150,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 63.112.253,- (94,77%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Forum Investasi dilaksanakan dalam rangka Percepatan Penyelesaian Perizinan Berusaha yang diikuti oleh 120 orang peserta yang terdiri dari Kepala Dinas DPM & PTSP Kabupaten/kota se Sumatera Barat, Dinas

Teknis/Tim Teknis Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan se Sumatera Barat.

- Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan PTSP, dan tujuannya adalah:
 1. Untuk menyatukan gerak langkah semua unsur terkait dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu;
 2. Menghimpun berbagai permasalahan serta pemecahannya;
 3. Serta melakukan evaluasi dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
- Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya forum PTSP dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang, yang terdiri dari aparatur DPM & PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- Dan Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya kesamaan visi dan misi serta gerak dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.848.615.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.841.223.567,- (99.60%) sedangkan untuk realisasi fisik atas penerbitan izin dan non izin yang ditargetkan melampaui realisasinya 3.125 izin/non izin dari 1.400 izin/non izin yang ditargetkan atau sebesar 223,21%, dan untuk penyelesaian izin/non izin sesuai dengan SOP adalah sebesar 84,10% dari target sebesar 80% atau sebesar 105,12% serta

- Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.
- Tujuan dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) adalah untuk membantu masyarakat/ pelaku usaha/investor/ penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal.

Ruang lingkup kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang mendapat

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan bagi perusahaan/perorangan yang berlokasi di Sumatera Barat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Melayani permohonan perizinan berusaha sesuai kewenangan;
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari si pemohon;
3. Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan pemohon;
4. Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan instansi terkait bila diperlukan;
5. Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal melalui SPIPISE dan OSS;
6. Melaksanakan proses permohonan perizinan Sektor Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API) umum maupun produsen yang berbasis Website (internet); dan
7. Menerbitkan dokumen perizinan berusaha.

➤ Keluaran Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) keluaran yaitu:

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP tahun 2018 telah diterbitkan izin dan non izin sebanyak 3.125 izin/rekomendasi melampaui target sebesar 223,,21% (target: 1.400 izin/rekomendasi).

➤ Hasil dari kegiatan yaitu persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu dapat terealisasi sebesar 84,10% atau sebesar 105,12% (target 80%).

- c. **Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 61.837.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 58.749.800,- (99,60%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan terkait dengan Perubahan Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terkait pelayanan Perizinan berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

- Adapun maksud dari kegiatan ini adalah menyusun regulasi terkait proses pengaduan pelayanan perizinan untuk terwujudnya percepatan proses penerbitan perizinan.
- Tujuannya adalah menghimpun peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan produk hukum yang akan menjadi landasan dalam penyelesaian masalah-masalah pengaduan dalam pengurusan izin di PTSP serta mensinkronkan peraturan yang sudah ada untuk penerbitan produk hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan pengaduan di PTSP sesuai dengan pelimpahan kewenangan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan.
- Dan Hasil dari kegiatan ini adalah dapat tersusunnya perubahan Keputusan Gubernur terkait perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP). (sesuai target).

q. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 97.671.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 94.481.337,- (96,73%) sedangkan realisasi fisiknya melebihi seratus sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan terkait laporan permasalahan yang muncul dalam pelayanan perizinan yang dilakukan dalam bentuk mediasi terhadap pengaduan izin yang bermasalah.

- Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi disaat investor mengurus perizinan yang ada di bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan tumbuhnya ekonomi Sumatera Barat dengan mensukseskan investasi Sumatera Barat dimana salah satunya adalah dengan memfasilitasi investor dalam percepatan pengurusan izin dimaksud.
- Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan mediasi permasalahan pengurusan izin dari 15 yang ditargetkan dapat difasilitasi sebanyak 24 permasalahan
- Dan Hasil dari kegiatan ini adalah termediasinya permasalahan dalam pengurusan perizinan yang dilakukan oleh calon investor.

d. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 60.829.500,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 57.714.100,- (94,88%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Mensinkronkan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan dan standar operasional pelayanan;
2. Menghimpun berbagai masalah dan mencari pemecahannya; dan
3. Mengevaluasi perkembangan dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan.

e. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 504.556.525,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 501.750.087,- (99,44%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi dilaksanakan untuk mendukung kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP serta pelayanan secara elektronik dengan didukung komputer jaringan dan perangkat komputer yang baik yang diharapkan mempercepat penyelenggaraan perizinan kepada masyarakat.

f. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.625.855.400,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.610.315.570,- (99,44%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dilaksanakan untuk 660 orang pelaku usaha, tokoh masyarakat, KAN, LKAAM, Camat, Walinagari dan aparatur DPM & PTSP kabupaten/kota se Sumatera Barat yang dilaksanakan dalam beberapa angkatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Menyebarkan informasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan adanya perizinan cepat, mudah, transparan dan pasti.

3. Sarana pembelajaran dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, kesejahteraan sehingga masyarakat mau dan mapu berperan serta dalam setiap program pemerintah.

- g. Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 67.936.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 65.036.750,- (95,73%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dilaksanakan dalam memantau secara langsung terhadap kegiatan aparatur PTSP untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh DPM & PTSP apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- h. Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 67.872.900,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 67.391.200,- (99,29%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dilakukan 2 kali dalam tahun 2018 sesuai dengan evaluasi Menpan. Dari 2 kali pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan diperoleh kinerja unit pelayanan “ Sangat Baik “ dengan nilai sebesar 81,98. Dan setelah dikonversikan didapatkan nilai akumulasi IKM sebesar 3,27. Kinerja dari Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan sebesar 99,09% dibandingkan dengan target sebesar 3,30.
- i. Penilaian Standar Mutu Perizinan** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 89.772.250,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 88.468.500,- (98,55%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Kegiatan Penilaian Standar Mutu Perizinan tahun 2018 dilaksanakan terkait untuk Pendampingan terhadap perubahan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO dari 9001:2008 menjadi 9001:2015 yang berlaku sampai dengan 01 Agustus 2021.



Secara umum permasalahan yang masih terjadi dalam penanaman modal di Sumatera Barat yang teridentifikasi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh belum ditematkannya tim teknis dari OPD Teknis terkait dalam penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti area parkir sehingga kepuasan masyarakat dalam pengurusan Perizinan dan Non Perizinan belum optimal.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas yang ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Perubahan Kebijakan Pemerintah terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang mengakibatkan perubahan prosedur penyelenggaraan Perizinan.
5. Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang masih perlu dilakukan kajian dan perubahan dengan proses pertimbangan teknis dari OPD teknis.
6. Rendahnya daya beli energi listrik oleh PLN, yaitu sebesar 7 cent USD atau sekitar Rp. 938,- dimana harga ini lebih rendah dari ketetapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2015 yaitu sebesar 9,30 cent USD atau sekitar Rp. 1.246,-
7. Penyusunan rencana tata ruang dan tata Wilayah yang berorientasi kepada investasi

Dari permasalahan di atas dapat direkomendasikan solusinya sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rekomendasi tim BPKP sudah disarankan ke Tim Evaluasi untuk pembangunan gedung baru untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengantisipasi kekurangan Sumber Daya Manusia baik itu secara kuantitas maupun kualitas sudah diusulkan permintaan tambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Melakukan revisi dan perubahan Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan.
- 4.

Padang, 31 Januari 2019
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat,

Maswar Dedi, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19740618 199311 1 001